

# INTEGRASI PEMANFAATAN PETA KERJA DAN MONOGRAFI FISKAL BERBASIS WEBGIS DALAM PENGAWASAN KEWILAYAHAN

Redhy Matabean

Kepala Seksi Pengawasan IV KPP Pratama Singkawang. Email: [redhy.matabean@gmail.com]

## ABSTRAK

Pembuatan Peta Kerja merupakan salah satu aspek penting pada tahap perencanaan Kegiatan Pengumpulan Data Lapangan (KPD L) dalam rangka pengawasan kewilayahan. Dengan berkembangnya pemanfaatan peta berbasis *Google platform* pada berbagai sektor, membuka peluang pemanfaatan peta WebGIS sebagai alternatif dalam pembuatan Peta Kerja dan menampilkan data potensi ekonomi wilayah dalam bentuk Monografi Fiskal. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana implementasi pembuatan Peta Kerja dalam KPD L saat ini serta peluang pembuatan Peta Kerja berbasis WebGIS dengan memanfaatkan *platform* dari Google MyMap yang diintegrasikan dengan data yang tersedia pada Laporan Monografi Fiskal. Penelitian ini menggunakan paradigma penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pembuatan Peta Kerja dalam KPD L belum dilakukan dengan optimal yang disebabkan oleh masih kurangnya pemahaman *Account Representative* terhadap Peta Kerja dan belum tersedianya aplikasi untuk pembuatan Peta Kerja. WebGIS Peta Kerja dapat menjadi sarana alternatif yang dapat dipergunakan oleh AR Kewilayahan dalam pembuatan Peta Kerja sekaligus menampilkan data Monografi Fiskal.

KATA KUNCI: Peta Kerja, Kegiatan Pengumpulan Data Lapangan, Monografi Fiskal, WebGIS.

## 1. PENDAHULUAN

Sejak Google memetakan dunia di tahun 2005, Google Map menjadi peta yang paling diminati dan digunakan secara global. Hingga tahun 2020, Google Map telah digunakan oleh lebih dari satu miliar orang setiap bulannya (Lararenjana, 2020). Google Map telah meliputi setidaknya 99% wilayah pada berbagai negara di seluruh dunia. Sementara dari sisi jumlah data, sekitar 200 miliar data *places* dan lebih dari 40 miliar meter jalanan di dunia telah tersimpan pada basis data Google (Panatagama, 2020). Layanan peta dari Google dengan berbagai inovasi yang dikembangkannya telah merambah berbagai sektor, dari penggunaan pribadi, kepentingan bisnis hingga sektor pemerintah.

Salah satu pemanfaatan peta Google di sektor pemerintahan, khususnya oleh otoritas pajak, dilakukan oleh pemerintah Perancis. Otoritas pajak Perancis tengah mengembangkan aplikasi khusus berbasis kecerdasan buatan yang mampu melakukan analisis terhadap peta yang ditampilkan Google Earth. Aplikasi tersebut digunakan sebagai alat pengawasan untuk mendeteksi risiko berdasarkan kepemilikan properti dari wajib pajak, dimana salah satu indikatornya adalah kepemilikan kolam renang (Setiawan, 2021). Adapun Direktorat Jenderal Pajak (DJP) sebagai otoritas pajak Indonesia telah memanfaatkan peta dari Google dalam kegiatan pemetaan wajib pajak berbasis lokasi atau *geo tagging* pada tahun 2016.

Sejalan dengan konsep penguasaan wilayah yang dicanangkan dalam Rencana Strategis tahun 2020-2024, DJP telah menerbitkan Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak nomor SE-11/PJ/2020 sebagai panduan pengumpulan data dan/atau informasi melalui Kegiatan Pengumpulan Data Lapangan (KPD L). Pada KPD L, KPP melakukan pengumpulan data dan/atau informasi pada lokasi tempat tinggal, tempat kedudukan dan/atau tempat kegiatan usaha atau harta wajib pajak, melalui pengamatan langsung, *tagging*, pengambilan gambar, dan/atau wawancara. Selain pengumpulan data dan/atau informasi, KPD L dimaksudkan untuk meningkatkan kualitas dan validitas data, memetakan wajib pajak, serta mengidentifikasi potensi pajak yang ada dalam wilayah KPP.

Pada pengumpulan data dan/atau informasi melalui KPD L berbasis kewilayahan, salah satu tahapan yang dilakukan oleh *Account Representative* Kewilayahan (AR Kewilayahan) adalah membuat Peta Kerja. Peta Kerja merupakan peta yang menggambarkan sekumpulan bidang, persil, unit, atau lokasi yang akan dilaksanakan aktivitas penyisiran berdasarkan urutan prioritas, dengan mempertimbangkan potensi ekonomi, rasio pajak, kepadatan penduduk pada wilayah penyisiran, serta ketersediaan sumber daya di KPP.

Dalam proses pembuatan Peta Kerja, AR Kewilayahan perlu melakukan identifikasi potensi pajak dalam zona pengawasannya. Potensi pajak tersebut ditentukan melalui analisis data statistik atas jumlah penduduk, jumlah wajib pajak orang pribadi dan badan yang telah memiliki NPWP, jumlah penerimaan dan pertumbuhan pajak, gambaran ekonomi dan sektor usaha dominan, serta analisis

perpajakan di wilayah pengawasannya. Data statistik yang dibutuhkan sebagai bahan pertimbangan dalam pembuatan Peta Kerja dapat diperoleh dari Monografi Fiskal.

Data yang tersedia pada Monografi Fiskal berpeluang untuk diintegrasikan dengan Peta Kerja. Namun demikian, integrasi tersebut menghadapi setidaknya dua tantangan. *Pertama*, sampai saat ini, belum tersedia aplikasi yang dapat memfasilitasi pembuatan Peta Kerja oleh AR Kewilayahan. *Kedua*, belum tersedianya sistem informasi yang dapat mengelola data Monografi Fiskal. Dalam ketentuan saat ini, Monografi Fiskal masih dilaporkan oleh KPP kepada Direktorat Ekstensifikasi dan Penilaian dalam format *file* PDF dan Microsoft Excel.

Makalah ini bertujuan untuk menyampaikan gagasan pengintegrasian Peta Kerja dan Monografi Fiskal melalui pembuatan aplikasi WebGIS Peta Kerja. Untuk mengetahui apakah gagasan tersebut dapat diimplementasikan di KPP, penulis melakukan analisis terhadap dua aspek. *Pertama*, bagaimana implementasi pembuatan Peta Kerja dan pemanfaatan Monografi Fiskal di KPP saat ini. *Kedua*, bagaimana aplikasi WebGIS Peta Kerja dapat mengakomodir kebutuhan AR Kewilayahan dalam membuat Peta Kerja dan menampilkan data Monografi Fiskal.

## 2. KERANGKA TEORI DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS

### 2.1. Peta Kerja

Peta adalah gambaran permukaan bumi yang diperkecil dalam skala tertentu yang dilukiskan dalam bidang datar. Peta menunjukkan lokasi suatu daerah atau tempat tertentu di bumi. Proses pembuatan peta disebut pemetaan (Indarwati, 2019). Adapun istilah peta kerja secara umum dapat dikatakan sebagai peta yang dipergunakan untuk menggambarkan suatu aktivitas tertentu sesuai tujuannya. Definisi Peta Kerja menurut Wignjosoebroto(1995), adalah suatu alat yang sistematis dan jelas untuk berkomunikasi secara luas dan sekaligus bisa mendapatkan informasi-informasi yang diperlukan untuk memperbaiki suatu metode kerja. Dari definisi tersebut maka Peta Kerja KPDL dapat diartikan sebagai peta yang dipergunakan dan menunjukkan lokasi tertentu dan berisi data dan/atau informasi berbasis spasial untuk mendukung kegiatan KPDL. Berdasarkan Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak nomor SE-11/PJ/2020 tentang Tata Cara Kegiatan Pengumpulan Data Lapangan dan Penjaminan Kualitas Data dalam Rangka Perluasan Basis Data, format Peta Kerja setidaknya mengandung informasi nomor Peta Kerja, nama kawasan/jalan/pasar/komplek, kelurahan/desa serta sektor lapangan usaha dominan. Contoh format Peta Kerja sesuai SE-11/PJ/2020 adalah sebagaimana Gambar 1 berikut:

Gambar.1 Format Peta Kerja

Nomor PK	Nama Kawasan/Jalan/Pasar/Kompleks/dll	Kelurahan/Desa	Sektor Lapangan Usaha Dominan
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Komplek Velodrome	Rawamangun	Perdagangan

**Deskripsi**

Komplek Velodrome, Kelurahan Rawamangun, Kecamatan Pulogadung, Kota Jakarta Timur merupakan arena olah raga bertaraf internasional yang baru berdiri, sehingga banyak tumbuh usaha perdagangan pada kawasan tersebut, dan perlu dilakukan pembaruan secara berkala.

#### PETUNJUK PENGISIAN :

- Kolom (1) : Nomor Peta Kerja
- Kolom (2) : Nama kawasan/wilayah/zona Peta Kerja yang akan menjadi target Pengumpulan Data Lapangan (terbatas pada suatu batas wilayah administrasi)
- Kolom (3) : Nama wilayah administrasi (desa/kelurahan) yang meliputi kolom (4)
- Kolom (4) : Jenis sektor lapangan usaha dominan yang terdapat pada kolom (2)
- Deskripsi : Penjelasan tentang kawasan/wilayah/zona Peta Kerja

Sumber: SE-11/PJ/2020

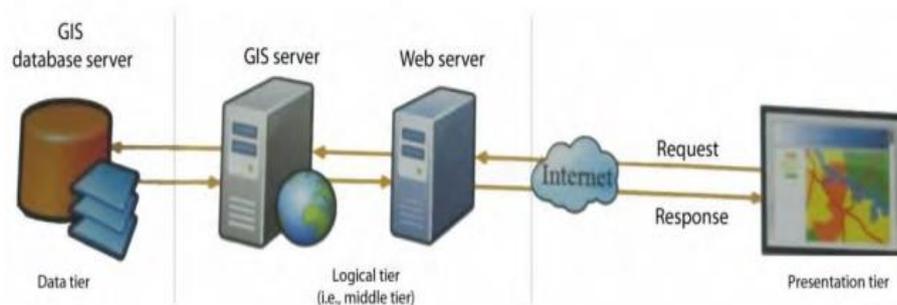
### 2.2. WebGIS

Menurut Irwansyah (2013), Sistem Informasi Geografis (SIG) adalah sistem yang dirancang untuk menangkap, menyimpan, memanipulasi, menganalisis, mengatur, dan menampilkan semua jenis data geografis. Data pada SIG dapat berupa data spasial yang menampilkan kenampakan

permukaan bumi, maupun data non spasial atau data atribut yang mendeskripsikan data spasial. Data yang diolah dan divisualisasikan secara spasial serta memiliki data *geo-reference* secara publik dapat bermanfaat tidak hanya memudahkan untuk menelusuri, menemukan, dan memahami pada level individu, namun juga dalam bentuk agregat sehingga membantu memahami tren dan fitur data. Hal ini sebagaimana dikemukakan oleh Ahern, et.al (2007) yaitu *“The availability of map interfaces and location-aware devices makes a growing amount of unstructured, geo-referenced information available on the Web. This type of information can be valuable not only for browsing, finding and making sense of individual items, but also in aggregate form to help understand data trends and features”*.

Sejalan dengan kemajuan teknologi internet, SIG atau *Geographic Information System* (GIS) saat ini telah berkembang menjadi WebGIS. Painho (2001) mendefinisikan WebGIS sebagai suatu sistem yang dapat terhubung kedalam jaringan internet, yang digunakan untuk mengumpulkan, menyimpan, dan menampilkan data/informasi bergeoreferensi atau data yang mengidentifikasi lokasi objek tanpa adanya kebutuhan penggunaan *software* SIG. WebGIS dapat menghubungkan beberapa perangkat pada suatu portal untuk memudahkan *user* dalam mencari informasi yang dibutuhkan. WebGIS juga dapat digunakan dalam aplikasi *smartphone* maupun *desktop* dengan mengakses laman website. Skema sederhana WebGIS dapat dilihat pada Gambar 2 berikut:

Gambar 2. Skema WebGIS

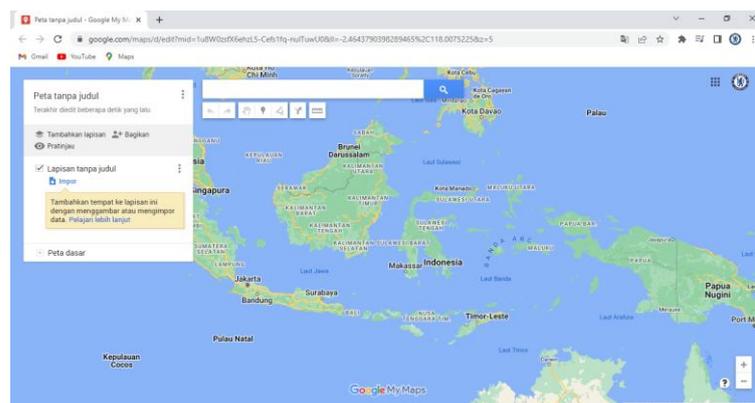


Sumber: Fu dan Sun, 2012

Teknologi pemetaan yang pada mulanya masih berbasis desktop, saat ini telah tersedia dalam bentuk *Web Mapping*. Salah satu teknologi *Web Mapping* yang telah dikembangkan oleh Google adalah Google My Maps, sebuah fitur yang disediakan secara gratis kepada pemilik akun Google. Google My Maps memungkinkan pengguna untuk membuat peta berbentuk poligon, garis, maupun titik sebagai penanda lokasi. Peta yang dibuat oleh pemilik akun di Google My Maps akan tersimpan di *drive* dari akun tersebut dan hanya dapat diakses oleh pemilik akun. Namun demikian, peta yang telah dibuat pada suatu akun dapat dibagikan untuk diakses pihak lain sesuai otorisasi yang diberikan oleh pemilik akun.

Fitur yang ada pada Google MyMaps juga mengakomodir pemilik akun untuk melakukan ekspor maupun impor peta. Peta yang dibuat di Google My Maps dapat diekspor dalam bentuk *file Keyhole Markup Language* (KML) atau dalam bentuk *file KMZ* (*file* KML yang telah dikempa), sehingga dapat dibuka dalam *software* pemetaan seperti QGIS atau ArcGIS. Selain itu, pemilik akun juga dapat melakukan impor peta dalam format KML serta mengimpor data yang telah dilengkapi koordinat (lintang dan bujur) dalam format *Comma Separated Values* (CSV) untuk ditampilkan ke dalam Google My Maps. Untuk membuka Google My Maps, pengguna terlebih dahulu *login* ke akun Google, pilih My Drive – Lainnya- lalu klik Google My Maps. Berikut adalah tampilan Google My Maps saat pertama kali dibuka:

Gambar 3. Tampilan Awal Google My Maps



### 2.3. Monografi Fiskal

Pengertian Monografi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah tulisan (karangan, uraian) mengenai suatu bagian dari suatu ilmu atau mengenai suatu masalah tertentu. Adapun dalam kamus Merriam Webster monografi atau *monograph* mengandung makna "a learned treatise on a small area of learning". Istilah monografi berasal dari kata "*monographia*" dari bahasa Yunani yaitu: mono- ('single') dan grapho ('to write'), yang berarti 'menulis pada satu subjek'. Berbeda dengan buku teks, tujuan utama monografi adalah untuk menyajikan penelitian dasar dan ilmiah asli dengan kredibilitas yang dapat dipertanggungjawabkan. Menurut Helmi et.al (2018) istilah Monografi merupakan karya tulis ilmiah (KTI) hasil penelitian yang luas dan detail pada sebuah topik atau subjek dengan tingkat pembahasan yang mendalam dan/atau mengaitkan dengan berbagai pendekatan keilmuan.

Dalam praktik, istilah monografi banyak digunakan pada berbagai bidang. Di bidang pemerintahan dikenal istilah monografi desa yang merupakan himpunan data umum, personil, kewenangan, keuangan dan kelembagaan yang disusun pemerintah desa yang disusun sistematis dalam penyelenggaraan pemerintahan. Di bidang politik dikenal istilah Monografi Politik, yaitu peta politik berupa data tentang preferensi (pilihan) politik dan karakteristik pemilih dengan menjadikan skala desa/kelurahan sebagai unit analisis. Adapun di bidang perpajakan dikenal istilah Monografi Fiskal yang dibuat setahun sekali oleh Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak (Kanwil DJP) dan Kantor Pelayanan Pajak (KPP).

Pembuatan Monografi Fiskal diatur melalui Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-20/PJ.22/1995 tanggal 4 Juli 1995 tentang Pedoman Pembuatan Monografi Fiskal sebagaimana telah disempurnakan dengan Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-01/PJ.22/2003 tanggal 8 Agustus 2003. Sesuai ketentuan tersebut, Monografi Fiskal merupakan laporan tentang aspek dan potensi perpajakan di dalam wilayah unit kerja DJP yang terdiri atas 8 (delapan) bagian yaitu Gambaran Umum, Geografis, Wilayah dan Penduduk, Gambaran Ekonomi Daerah dan Penerimaan Pajak, Gambaran Sektor Usaha, Tenaga Kerja dan Perusahaan, Klasifikasi Pendidikan Pegawai dan Analisis Perpajakan.

### 2.4. Analisis SWOT

Analisis SWOT pertama kali diperkenalkan oleh Albert S Humphrey pada tahun 1960-an dalam memimpin proyek riset di Stanford Research Institute yang menggunakan data dari perusahaan-perusahaan Fortune 500. SWOT adalah singkatan dari *Strengths*, *Weaknesses*, *Opportunities*, dan *Threats*. Analisis SWOT merupakan suatu teknik perencanaan strategi yang bermanfaat untuk mengevaluasi Kekuatan (*Strength*) dan Kelemahan (*Weakness*), Peluang (*Opportunities*) dan Ancaman (*Threats*) dalam suatu proyek, baik proyek yang sedang berlangsung maupun dalam perencanaan proyek baru. Analisis SWOT adalah identifikasi berbagai faktor secara sistematis untuk merumuskan suatu strategi. Dalam perencanaan strategis sebuah keputusan harus menganalisis faktor-faktor strategis dari sebuah organisasi yang disebut sebagai analisis situasi. Model yang paling populer untuk analisis situasi adalah analisis SWOT (Rangkuti, 2001).

## 3. METODOLOGI PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Menurut Sugiyono (2016), metode penelitian kualitatif adalah metode yang digunakan untuk meneliti kondisi objek yang alamiah dimana peneliti sebagai instrumen kunci. Menurut Nazir (2014), penelitian deskriptif meneliti status kelompok manusia, objek, kondisi, sistem pemikiran ataupun peristiwa masa sekarang dengan tujuan untuk membuat deskriptif secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta yang diteliti. Menurut Sukmadinata (2011), penelitian deskriptif kualitatif ditujukan untuk mendeskripsikan dan menggambarkan fenomena-fenomena yang ada, baik bersifat alamiah maupun rekayasa manusia, yang lebih memperhatikan mengenai karakteristik, kualitas, keterkaitan antar kegiatan.

Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah melakukan survei melalui kuesioner, wawancara dan studi kepustakaan/dokumentasi. Sedangkan pemilihan informan menggunakan teknik *purposive sampling*. Menurut Arikunto (2006), *purposive sampling* adalah teknik mengambil sampel dengan tidak berdasarkan random, daerah atau strata, melainkan berdasarkan atas adanya pertimbangan yang berfokus pada tujuan tertentu. Menurut Sugiyono (2016), wawancara digunakan sebagai teknik pengumpulan data untuk menemukan permasalahan yang harus diteliti dan juga apabila peneliti ingin mengetahui hal-hal dari informan yang lebih mendalam.

Penulis melakukan survei untuk memperoleh gambaran pengetahuan AR Kewilayahan terhadap Peta Kerja. Survei dilakukan pada tanggal 11 Oktober 2021, dengan mengambil sampel responden 25 peserta PJJ Pengenalan Peta Digital dari Internet di BDK Cimahi. Peserta PJJ merupakan Account Representative Kewilayahan yang berusia antara 35 - 50 tahun dari berbagai KPP Pratama di wilayah kerja Kanwil DJP Banten, Jawa Barat I, Jawa Barat II dan Jawa Barat III. Selain itu, penulis melakukan wawancara terbatas dan mendalam (*indepth interview*) terhadap narasumber Kepala Seksi Penjaminan Kualitas Data (PKD). Melalui wawancara, penulis akan mengetahui lebih dalam terkait pemanfaatan

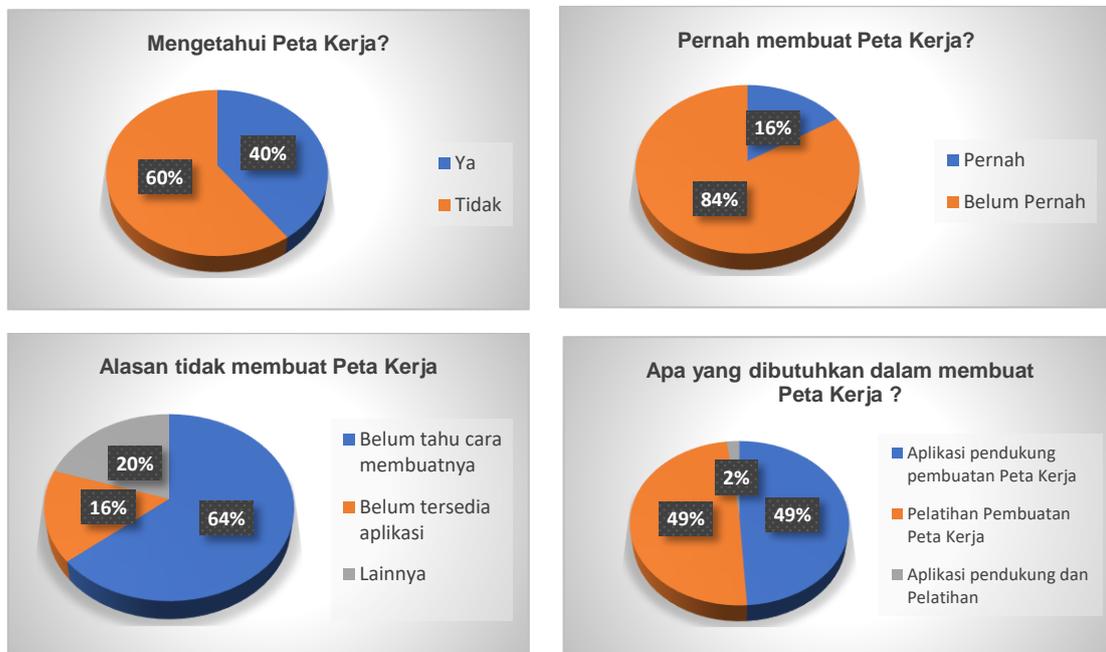
Monografi Fiskal dalam pengawasan kewilayahan dan pembuatan Peta Kerja. Penulis juga melakukan studi pustaka untuk mengumpulkan data sekunder melalui buku, catatan dan tutorial di internet serta jurnal yang relevan sebagai bahan referensi. Menurut Nazir (2014), studi pustaka adalah teknik pengumpulan data dengan mengadakan studi penelaahan terhadap buku, literatur, catatan, dan laporan yang ada hubungannya dengan masalah yang ingin dipecahkan.

#### 4. HASIL DAN PEMBAHASAN

##### 4.1. Implementasi Pembuatan Peta Kerja

Dari hasil survei yang dilakukan kepada responden AR di tiga Kanwil DJP diketahui bahwa 60% responden tidak mengetahui apa itu Peta Kerja dalam KPDL sementara sisanya sudah mengetahui Peta Kerja. Survei tersebut juga menunjukkan bahwa dari 40% AR yang mengetahui Peta Kerja, sebanyak 84% responden menyatakan belum pernah membuat Peta Kerja. Dari jawaban AR yang menyatakan belum pernah membuat Peta Kerja, 64% responden menyatakan alasan belum pernah membuat Peta Kerja karena belum tahu cara membuatnya dan 16% menjawab karena belum tersedianya aplikasi untuk membuat Peta Kerja. Survei tersebut juga menanyakan tentang kebutuhan dalam membuat Peta Kerja. Responden menjawab bahwa untuk dapat membuat Peta Kerja, 49% responden menyatakan bahwa dibutuhkan aplikasi untuk pembuatan Peta Kerja dan 49% lainnya menyatakan kebutuhan pelatihan untuk membuat Peta Kerja. Sementara sisanya sebanyak 2% menyatakan aplikasi pendukung dan pelatihan dibutuhkan dalam pembuatan Peta Kerja. Hasil survei tersebut ditampilkan dalam Grafik 1 di bawah ini:

Grafik 1. Hasil Survei Pengetahuan AR Kewilayahan Terhadap Peta Kerja



Dari hasil survei pengetahuan AR Kewilayahan terhadap Peta Kerja, diketahui bahwa sebagian besar AR Kewilayahan belum mengetahui Peta Kerja. Menurut penulis, masih terdapat *gap* antara tujuan kebijakan pembuatan Peta Kerja pada KPDL dan pengetahuan AR Kewilayahan terhadap kebijakan tersebut. Hal ini dapat disebabkan dari masih kurangnya sosialisasi kebijakan KPDL, khususnya hal yang bersifat teknis seperti pembuatan Peta Kerja, kepada AR Kewilayahan. Selain itu, dari survei tersebut diketahui bahwa ketersediaan aplikasi dan pelatihan pembuatan Peta Kerja merupakan dua aspek penting yang dibutuhkan oleh AR Kewilayahan untuk membuat Peta Kerja. Menurut Edward III (1980), komunikasi atas kebijakan, ketersediaan sumber daya, serta sikap dari pelaksana kebijakan menjadi faktor yang mempengaruhi keberhasilan dari suatu kebijakan. Oleh sebab itu, menurut hemat Penulis diperlukan langkah perbaikan komunikasi, penyediaan sumber daya berupa aplikasi pembuatan Peta Kerja, serta peningkatan *monitoring* agar tujuan kebijakan KPDL dapat lebih optimal.

##### 4.2. Pemanfaatan Monografi Fiskal

Penulis melakukan wawancara kepada narasumber yang bertugas sebagai Kepala Seksi Penjaminan Kualitas Data (Kasi PKD) sebagai pengampu IKU Pelaporan Monografi Fiskal untuk mengetahui bagaimana pemanfaatan Monografi Fiskal di KPP. Wawancara dilakukan terhadap

narasumber MS yang mewakili KPP di Kanwil DJP Sulselbarata dan AH yang mewakili KPP di Kanwil DJP Papua Maluku. Berdasarkan hasil wawancara dengan narasumber, data/informasi yang ada pada format Monografi Fiskal saat ini belum secara utuh menggambarkan potensi wilayah di KPP. Hal ini disebabkan terdapat data pada Monografi Fiskal tidak sesuai lagi dengan kondisi wilayah kerja KPP saat ini serta kesulitan KPP dalam memperoleh data. AH mengusulkan dilakukan penyesuaian format pada Monografi Fiskal, sedangkan MS menyarankan penambahan data dari sumber eksternal yang dilengkapi NIK sehingga dapat dimanfaatkan untuk penggalan potensi pajak.

Narasumber AH dan MS menyatakan bahwa Monografi Fiskal dapat dimanfaatkan dalam membuat analisis perpajakan sebelum membuat Peta Kerja, namun saat ini belum secara optimal dilakukan oleh AR Kewilayahan. Menurut narasumber, kurang lengkapnya ketersediaan data Monografi Fiskal menjadi faktor penyebab hal tersebut. Selanjutnya, penulis menanyakan pendapat AH dan MS terhadap gagasan mengintegrasikan Peta Kerja dan Monografi Fiskal dalam bentuk WebGIS. Keduanya setuju dengan gagasan tersebut karena secara visual lebih informatif dibandingkan dengan tampilan berupa tabel serta mengusulkan untuk ditampilkan sesuai dengan wilayah pengawasan.

Dari hasil wawancara tersebut terdapat tiga poin penting yang dapat disimpulkan. *Pertama*, data dan informasi pada Monografi Fiskal perlu dilakukan penyesuaian untuk lebih menggambarkan potensi wilayah. *Kedua*, ketika data Monografi Fiskal tersedia, berpotensi untuk dimanfaatkan dalam pembuatan Peta Kerja oleh AR Kewilayahan. *Ketiga*, visualisasi data Monografi Fiskal akan lebih informatif apabila ditampilkan dalam bentuk WebGIS.

### 4.3. Pembuatan Aplikasi WebGIS Peta Kerja

Peta Kerja merupakan visualisasi data dan informasi geografis berupa bidang, persil, unit, atau lokasi pada suatu wilayah yang dilakukan penyisiran dalam KPDL. Data dan informasi yang mengandung unsur geografis tersebut, dapat ditampilkan dalam sebuah Sistem Informasi Geografis (SIG). Belum tersedianya aplikasi pembuatan Peta Kerja mendorong penulis untuk membuat aplikasi WebGIS yang menyediakan *tools* pembuatan Peta Kerja serta menampilkan Monografi Fiskal, dengan memanfaatkan teknologi *web mapping* dari Google My Maps. Untuk tampilan WebGIS ini, digunakan *templates* dari platform Bootstrap 5. Pada *templates* tersebut dilakukan penyesuaian tampilan dengan menggunakan perangkat lunak Visual Studio Code untuk menyunting bahasa pemrograman HTML dan CSS di tampilan WebGIS. Peta wilayah administrasi kelurahan dan penambahan data atribut diolah pada aplikasi QGIS Desktop versi 3.10.10.

WebGIS Peta Kerja ini mengambil KPP Pratama Pekanbaru Senapelan sebagai *prototype*, dan dibuat dengan menggunakan data *dummy*. Saat mengakses WebGIS, pengguna akan masuk ke Halaman Utama dari WebGIS ini, yang terdiri dari Submenu Profil, Submenu Peta Kerja, Submenu Monografi Fiskal, Submenu Pegawai, dan Submenu Kontak Kami. Pada Submenu Profil, akan ditampilkan informasi mengenai KPP berupa alamat KPP, Wilayah Kerja, serta Data Pegawai. Informasi pada submenu dapat disesuaikan dengan kebutuhan informasi yang akan ditampilkan. Tampilan halaman utama dan halaman Submenu Profil dari aplikasi ini adalah sebagai berikut:

Gambar 4. Tampilan Halaman Utama WebGIS Peta Kerja



Gambar 5. Tampilan Halaman Submenu Profil KPP

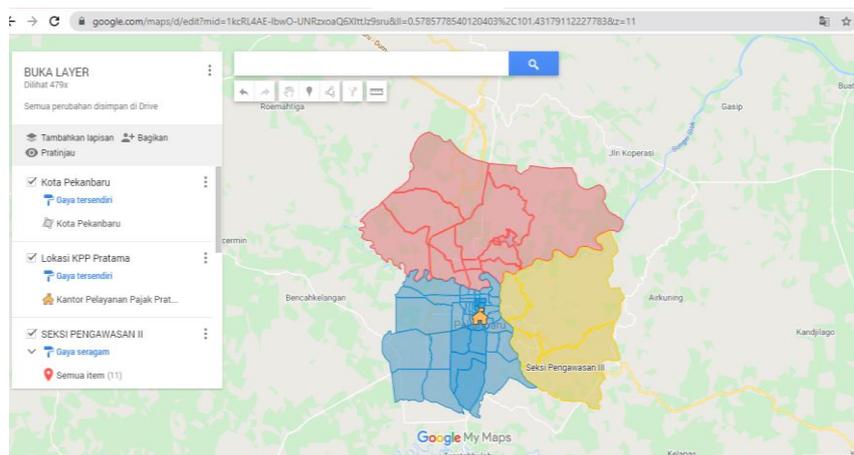


Pada halaman Submenu Peta Kerja, akan ditampilkan Peta Wilayah Kerja KPP dan Zona Pengawasan untuk setiap Seksi Pengawasan yang ada di KPP. Pengguna dapat menekan *icon*  untuk menampilkan *Layer* berdasarkan batas kelurahan, zona pengawasan untuk setiap Seksi Pengawasan, maupun sesuai zona pengawasan *Account Representative*. Dalam Peta Kerja tersebut juga tersedia *Layer* yang dapat menampilkan data Monografi Fiskal sesuai wilayah yang dipilih. Untuk pembuatan Peta Kerja baru dan melakukan *update* data, pengguna menekan *icon*  di bagian kanan layar peta sehingga tampilan halaman akan terhubung dengan peta di Google MyMaps. Pengguna dapat melakukan penambahan *Layer* untuk membuat poligon, melakukan *tagging* atas objek tertentu, maupun melakukan *update* atas data yang ada pada *Layer* WebGIS. Perubahan yang dilakukan pada Google MyMaps nantinya akan otomatis terkoneksi dengan WebGIS Peta Kerja.

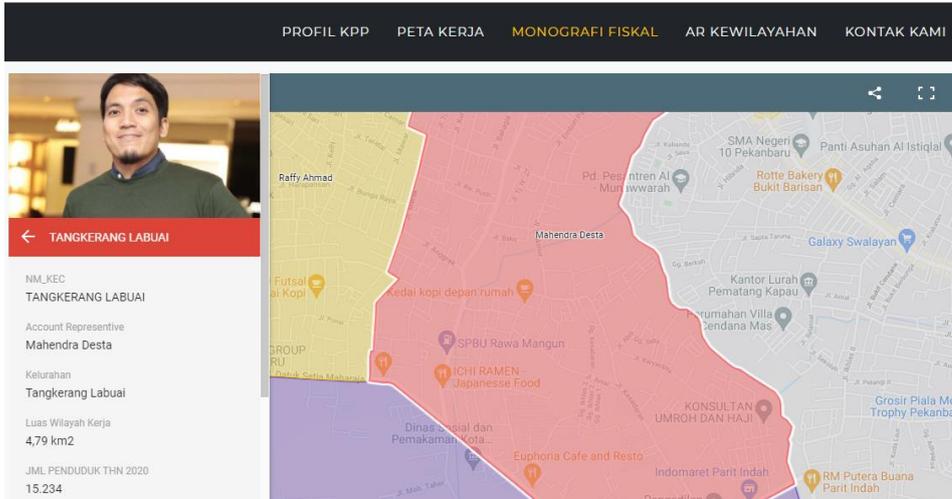
Gambar 6. Tampilan Halaman Peta Kerja



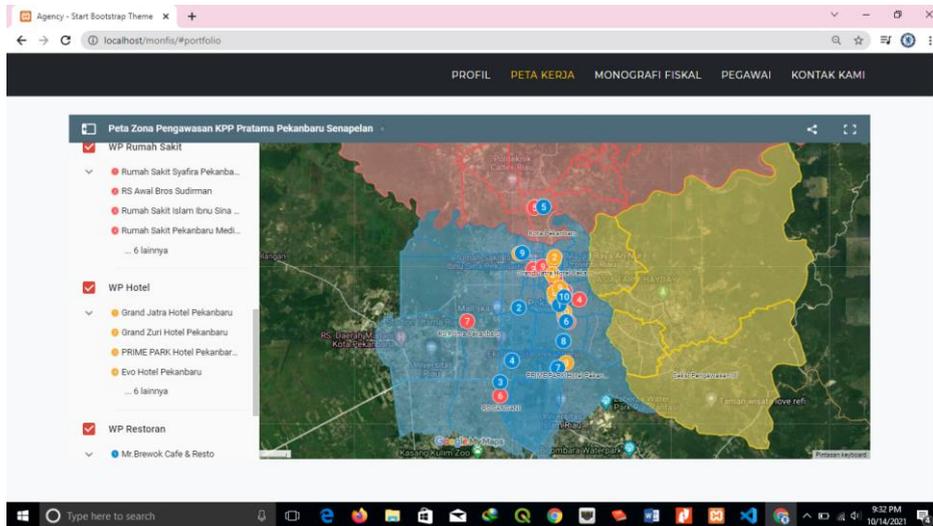
Gambar 7. Tampilan Layar *Editing* pada Google My Maps



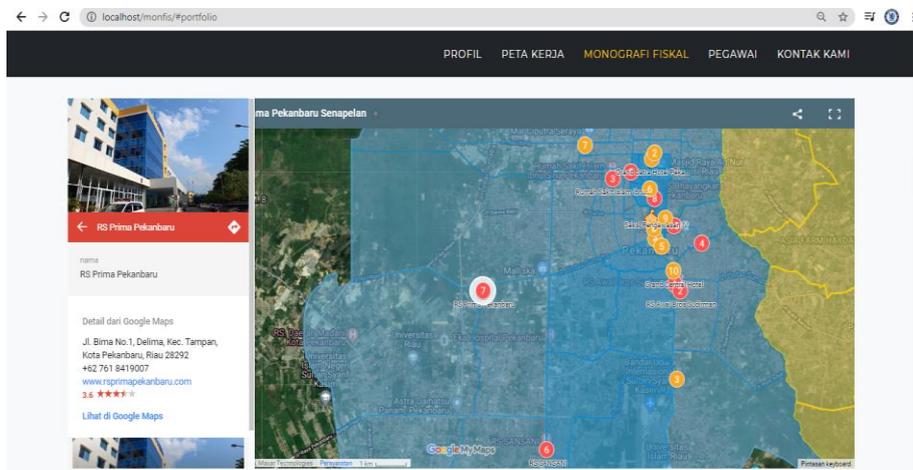
Gambar 8. Tampilan Layer Zona Pengawasan AR



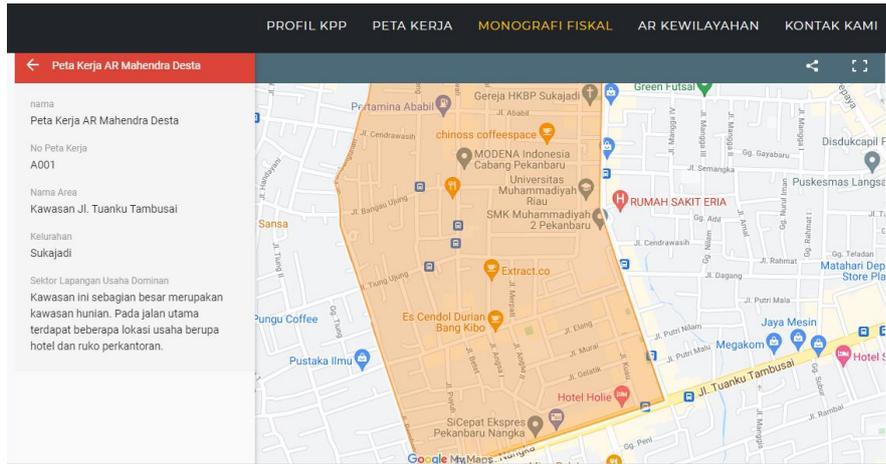
Gambar 9. Tampilan Layer Sebaran wajib pajak Berdasarkan KLU



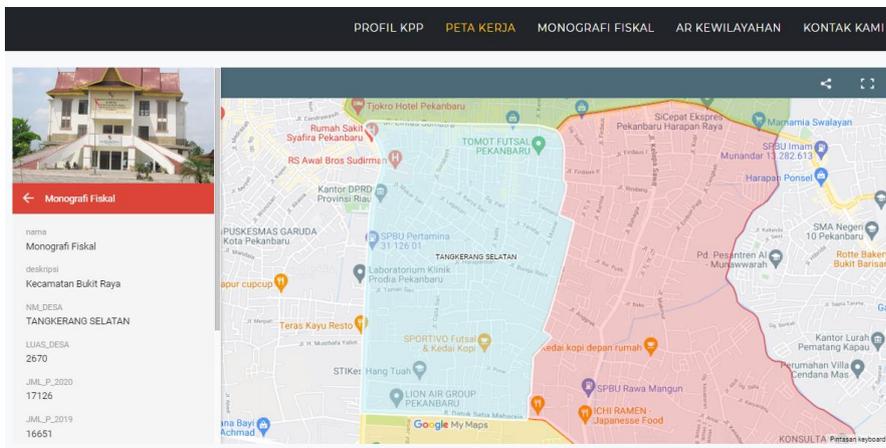
Gambar 10. Tampilan Lokasi dan Informasi Detail WP



Gambar 11. Tampilan Layer Peta Kerja AR Kewilayahan



Gambar 12. Tampilan Layer Monografi Fiskal



Selain Submenu Peta Kerja sebagai submenu spasial dari Aplikasi WebGIS ini, terdapat beberapa submenu lain untuk menampilkan data non spasial. Untuk Submenu Monografi Fiskal, terdapat analisis perpajakan setiap bagian dari kategori data yang ditampilkan pada Monografi Fiskal. Pada Submenu AR Kewilayahan, di tampilkan profil setiap AR Kewilayahan dan wilayah kerjanya masing-masing. Adapun untuk Submenu Kontak Kami, berisi formulir masukan dan informasi yang dapat disampaikan pengguna kepada administrator WebGIS. Tampilan dari setiap Submenu tersebut dapat dilihat pada gambar berikut:

Gambar 13. Tampilan Submenu Monografi Fiskal

PROFIL KPP PETA KERJA MONOGRAFI FISKAL AR KEWILAYAHAN KONTAK KAMI

## MONOGRAFI FISKAL

*Monografi Fiskal merupakan laporan tentang aspek dan potensi perpajakan di dalam wilayah unit kerja DJP yang dibuat setahun sekali oleh Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak (Kanwil DJP) dan Kantor Pelayanan Pajak (KPP). Monografi Fiskal terdiri atas 8 (delapan) bagian yang terdiri atas Gambaran Umum, Geografis, Wilayah dan Penduduk, Gambaran Ekonomi Daerah dan Penerimaan Pajak, Gambaran Sektor Usaha, Tenaga Kerja dan Perusahaan, Klasifikasi Pendidikan Pegawai dan Analisis Perpajakan.*

### Analisis Perpajakan

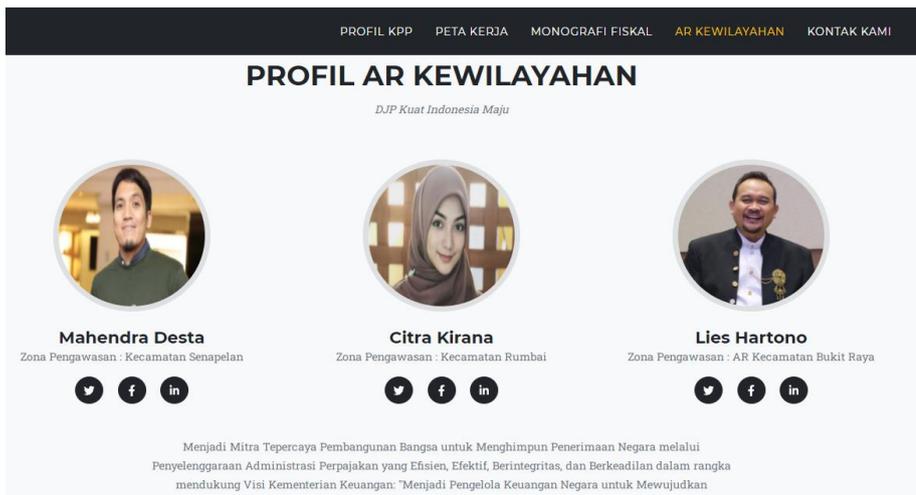
#### Perbandingan Luas Wilayah Yang Dikenakan PBB P5L

Jenis pajak PBB P5L bukan merupakan penerimaan yang mendominasi kinerja penerimaan KPP Pratama Pekanbaru Senapelan. Namun terdapat beberapa wilayah kecamatan yang di dalamnya terdapat sektor PBB P5L. Pada tahun 2020, luas wilayah perizinan sudah dikenakan PBB P5L sebesar 113,84% dari wilayah perizinan. Luas PBB P5L yang lebih besar daripada luas perizinan kemungkinan dikarenakan terdapat SKGR yang digunakan untuk kegiatan perkebunan. Pada tahun 2020 secara total terdapat penurunan pengenaan luas yang dikenakan PBB P5L sebesar 227.434 m<sup>2</sup>. Sedangkan untuk luas perizinan tidak terdapat kenaikan atau penurunan. Sektor Perkebunan hanya memiliki kontribusi sebesar 5,87% di penerimaan pajak Semester I 2021. Meskipun harga komoditas sawit sedang mengalami peningkatan, hal ini tidak berpengaruh banyak terhadap penerimaan pajak KPP Pratama Pekanbaru Senapelan mengingat wilayah kerja merupakan perkotaan.

#### Perbandingan Jumlah WP PPh OP dan Jumlah KK

Jumlah WP PPh OP KPP Pratama Pekanbaru Senapelan terus mengalami peningkatan setiap tahunnya. Jika dibandingkan dengan jumlah KK, pada tahun 2019 persentase antara WP OP PPh dengan Jumlah KK adalah sebesar 123% dan pada tahun 2018 sebesar 115,11%. Jumlah PPh OP yang melebihi dari Jumlah KK dapat dikarenakan Jumlah KK yang kami dapatkan merupakan Jumlah Rumah Tangga dari data BPS. Menurut BPS, Rumah tangga biasa adalah seseorang atau sekelompok orang yang mendiami sebagian atau seluruh bangunan fisik/sensus, dan biasanya makan bersama dari satu dapur. Sehingga memungkinkan satu rumah tangga bisa terdapat beberapa KK.

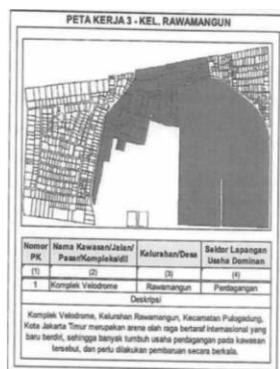
Gambar 14. Tampilan Submenu AR Kewilayahan



Gambar 15. Tampilan Submenu Kontak Kami

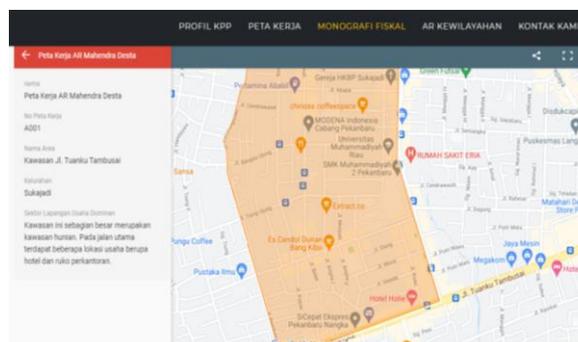


Gambar 16. Perbandingan Format Peta Kerja KPDL Sesuai SE-11/PJ/2020 dan WebGIS Peta Kerja



**PETUNJUK PENGISIAN :**

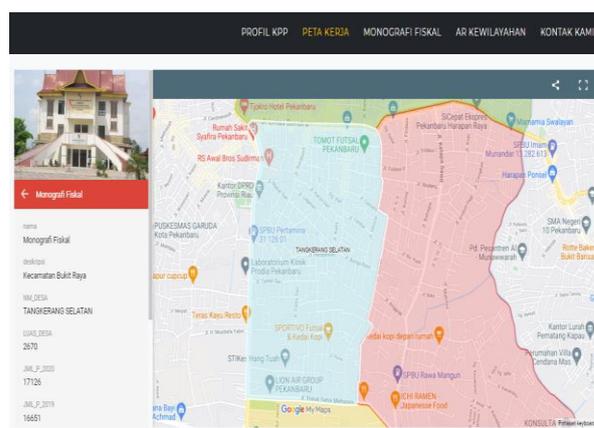
- Kolom (1) : Nomor Peta Kerja
- Kolom (2) : Nama kawasan/wilayah/zona Peta Kerja yang akan menjadi target Pengumpulan Data Lapangan (terbatas pada suatu batas wilayah administrasi)
- Kolom (3) : Nama wilayah administrasi (desa/kelurahan) yang meliputi kolom (4)
- Kolom (4) : Jenis sektor lapangan usaha dominan yang terdapat pada kolom (2)
- Deskripsi : Penjelasan tentang kawasan/wilayah/zona Peta Kerja



Gambar 17. Perbandingan Tampilan Laporan Monografi Fiskal dan Monografi Fiskal pada WebGIS Peta Kerja

Tabel 1 Luas Wilayah Kerja dan Jumlah Penduduk KPP Pratama Pekanbaru Senapelan

Kabupaten/Kota Kecamatan (Desa/Kelurahan)*	Nama Kecamatan (Desa/Kelurahan)*	Luas Kecamatan (Desa/Kelurahan)* (dalam km2)	% thd Luas Wilayah Kerja	Jumlah Penduduk			Jumlah KK		
				2020	2019	2018	2020	2019	2018
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
KULIM	PERAGUAN	7,91	13,91%	10,679	10747	2,651	2,623		
	KULIM	20,32	35,73%	2,120	2095	882	871		
	MENTANGOR	5,00	8,79%	15,345	15196	4,549	4,501		
	PEMANTANG KAPAU	5,37	9,44%	16,079	15624	4,319	4,272		
	SALANG RAHMAH	10,27	18,10%	4,564	4894	1,748	1,759		
<b>Jumlah</b>	<b>56,87</b>	<b>100,00%</b>	<b>48,571</b>	<b>48,719</b>	<b>14,142</b>	<b>13,956</b>			
LIMA PULUH	PESIR	0,66	21,20%	9,199	8,777	3,130	3,798		
	PINTIS	0,68	16,62%	9,318	8,890	1,579	1,983		
	SEKIP	0,82	20,20%	10,270	9,788	2,612	2,994		
	TANJUNG RBU	1,68	41,96%	14,674	14,261	2,985	3,880		
	<b>Jumlah</b>	<b>4,84</b>	<b>100,00%</b>	<b>44,061</b>	<b>41,696</b>	<b>10,306</b>	<b>11,655</b>		
PEKANBARU, KOTA	KOTA BARU	0,24	10,62%	3,159	3,082	716	692		
	SUMAHILANG	0,51	22,57%	5,594	5,431	1,266	1,913		
	SIMPANG EMPAT	0,66	29,20%	1,748	1,603	366	596		
	TANAH DATAR	0,29	12,81%	7,004	6,481	1,589	1,565		
	<b>Jumlah</b>	<b>2,25</b>	<b>100,00%</b>	<b>26,905</b>	<b>25,193</b>	<b>6,117</b>	<b>5,866</b>		
RUMAH	SRI MERANTI	6,34	15,10%	19,823	19,758	4,654	4,643		
	PALAS	24,20	38,12%	10,005	9,972	2,456	2,448		
	LIMAN SAR	9,30	15,03%	13,949	13,006	3,038	3,020		
	LEMBANG DAMAI	13,05	21,70%	8,501	8,461	2,512	2,502		
	<b>Jumlah</b>	<b>52,89</b>	<b>100,00%</b>	<b>52,282</b>	<b>51,207</b>	<b>12,666</b>	<b>12,613</b>		
MERANTI, PANGKAJENE	MERANTI PANGKAJ	3,88	6,27%	13,076	13,013	3,217	3,203		



#### 4.4. Analisis SWOT Pemanfaatan Aplikasi WebGIS Peta Kerja

Penulis melakukan analisis SWOT untuk mengetahui bagaimana aplikasi WebGIS Peta Kerja yang telah dibuat dapat diimplementasikan. Aspek keunggulan (*Strength*) dari aplikasi ini, dapat diidentifikasi pada beberapa hal. *Pertama*, kelengkapan fitur. Aplikasi ini dapat mengakomodir kebutuhan pengguna untuk membuat poligon, titik maupun garis dan menandai lokasi dalam bentuk *Point of Interest (Pol)*. Kelengkapan fitur tersebut dapat membantu pengguna untuk membuat bidang, persil, unit, atau lokasi pada suatu wilayah dalam Peta Kerja. *Kedua*, kemudahan akses. Aplikasi ini berbasis Google My Maps sehingga setiap pemilik akun Google dapat mengakses aplikasi untuk membuat peta. *Ketiga*, kemampuan analisis spasial. Aplikasi ini dapat melakukan eksplorasi data yang disajikan dalam bentuk peta tematik. *Keempat*, Kemudahan perubahan data. Pengguna dapat dengan mudah melakukan perubahan data langsung pada aplikasi secara *real time*.

Selain kelebihan, Penulis mengidentifikasi setidaknya dua kelemahan (*weaknesses*) dari Aplikasi WebGIS ini. *Pertama*, basis data pada aplikasi belum terkoneksi dengan basis data DJP. Basis data pada aplikasi ini masih tersimpan secara lokal pada *drive* dari pemilik akun dan belum terhubung dengan Master File Wajib Pajak (MFWP). *Kedua*, analisis spasial yang terbatas. Aplikasi ini hanya dapat melakukan analisis spasial yang bersifat visualisasi, namun belum dapat melakukan analisis yang bersifat eksplorasi dan pemodelan.

Namun demikian, Aplikasi WebGIS Peta Kerja memiliki dua peluang (*opportunity*) untuk diimplementasikan dan dikembangkan. *Pertama*, aplikasi pembuatan Peta Kerja belum ada. Hingga saat ini belum tersedia aplikasi yang disediakan DJP dalam membuat Peta Kerja, sehingga aplikasi ini dapat menjadi alternatif bagi AR Kewilayahan sampai dengan tersedianya aplikasi yang disediakan oleh DJP. *Kedua*, peluang untuk mengembangkan kemampuan analisis spasial. Aplikasi ini akan dapat lebih bermanfaat ketika telah terkoneksi dengan basis data DJP seperti MFWP, pembayaran pajak, data pemicu, data *Compliance Risk Management (CRM)*, serta basis data dari pihak ketiga.

Pengembangan analisis spasial dengan memanfaatkan data dari pihak ketiga sangat dimungkinkan ketika Nomor Induk Kependudukan (NIK) telah menjadi NPWP, yang sekaligus sebagai *primary key*. Integrasi basis data spasial PBB sektor Pedesaan dan Perkotaan (PBB P2), basis data kepemilikan tanah dari Badan Pertanahan Nasional (BPN) dan basis data spasial yang dimiliki DJP akan mengoptimalkan analisis spasial dalam pengawasan wajib pajak berbasis kewilayahan. Hal ini dimungkinkan dengan telah ditetapkannya NIK sebagai NPWP.

Adapun ancaman (*threat*) yang dapat menghambat penerapan aplikasi WebGIS Peta Kerja di KPP Pratama terkait dua hal. *Pertama*, tingkat keamanan data. Data spasial pada aplikasi ini tersimpan pada akun *drive* pemilik akun sehingga terdapat resiko data dapat diakses tanpa otorisasi. *Kedua*, proses pengembangan aplikasi. Saat ini ketentuan mengenai tata kelola data dan pembuatan aplikasi telah diatur secara khusus, sehingga pengembangan aplikasi lebih lanjut membutuhkan waktu dan persetujuan dari pihak terkait.

Gambaran analisis SWOT terhadap aplikasi WebGIS Peta Kerja dapat dilihat pada matriks di Tabel 1 berikut:

Tabel.1 Analisis SWOT Aplikasi WebGIS Peta Kerja

Opportunity	Threat	Strength	Weakness
1. Sebagai aplikasi pembuatan peta kerja alternatif	1. Tingkat keamanan data	1. Fitur lengkap	1. Belum terkoneksi dengan basis data DJP
2. Potensi pengembangan analisis spasial	2. Proses perizinan dalam pengembangan aplikasi	2. Kemudahan akses 3. Kemampuan analisis spasial 4. Kemudahan dalam update data	2. Analisis spasial masih terbatas

## 5. KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil pembahasan dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut:

1. Kebijakan pembuatan Peta Kerja dalam KPDL belum dilaksanakan dengan optimal, yang disebabkan masih kurangnya pemahaman AR Kewilayahan terhadap Peta Kerja dan belum tersedianya aplikasi untuk pembuatan Peta Kerja.
2. Monografi Fiskal berpeluang untuk dimanfaatkan dalam rangka analisis potensi dalam pembuatan Peta Kerja dengan sebelumnya melakukan penyesuaian ketersediaan data.
3. Aplikasi WebGIS Peta Kerja dapat menjadi alternatif aplikasi yang dipergunakan oleh AR Kewilayahan dalam pembuatan Peta Kerja dan menampilkan data Monografi Fiskal dengan beberapa kelebihan dan kekurangannya.

Agar pembuatan Peta Kerja dan visualisasi Monografi Fiskal dapat lebih optimal, saran untuk pengembangan berikutnya adalah:

1. Aplikasi selanjutnya agar memfasilitasi pembuatan Peta Kerja dengan mempertimbangkan tidak hanya berupa batas zona pengawasan dari setiap *Account Representative*, namun diperkaya dengan analisis spasial bersifat eksplorasi dan pemodelan yang salah satunya dapat memanfaatkan analisis *Business Intelligence* serta *Compliance Risk Management (CRM)* berbasis kewilayahan atau zona pengawasan.
2. Agar Monografi Fiskal dapat dikelola dan dalam suatu aplikasi khusus dan memiliki modul dan basis data tersendiri yang ditampilkan dengan berbasis spasial. Peluang untuk mewujudkan hal ini dapat terjadi apabila Monografi Fiskal dapat menjadi salah satu modul dalam DJP Digital Map sebagai salah satu aplikasi *support needed* yang saat ini sedang dikembangkan untuk mendukung *Core Tax Administration System (CTAS)*.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku atau Sumber Lain

- Ahern, Shane. Et.al. 2007. *World Explorer: Visualizing Aggregate Data from Unstructured Text in Geo-Referenced Collections*. JCDL'07 June 17-22. Vancouver, British Columbia, Canada.
- Arikunto. 2006. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*. PT. Rineka Cipta. Jakarta.
- Edward III, George C. 1980. *Implementing Public Policy*. Washington DC: Congressional Quarterly Press.
- Fu, P., dan Sun, J., 2012. *Web GIS : Principles and Applications*, First Edition, ESRI Press. New York Street, California.
- Helmi, R. L.; Safitri, M.; Fazi, R.; Mahelingga, D. E.I. R; Suhendra, M.F.; Hartiningsih, R.W.; Indrasari, N.P.; Kusuma, S.H.; Taslima, R.H. 2018. *Pedoman Penerbitan Buku LIPI Press*. LIPI PRESS Jakarta.
- Indarwati, D. 2019. *Berkenalan Dengan Peta*. CV Graha Printama Selaras. Sukoharjo.
- Irwansyah, E. 2013. *Sistem Informasi Geografis: Prinsip Dasar dan Pengembangan Aplikasi*. Digibooks. Yogyakarta.
- Nazir, Moh. 2014. *Metode Penelitian*. Ghalia Indonesia. Bogor.
- Painho, M. P. 2001. *WebGIS as a Teaching Tool*. San Diego. California.

- Rangkuti, F. 2001. *Analisis SWOT Teknik Membedah Kasus Bisnis*. PT Gramedia Pustaka Utama. Jakarta.
- Sugiyono. 2016. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R & D*. Alfabeta. Bandung.
- Sukmadinata, N.S. 2011. *Metode Penelitian Pendidikan*. Remaja Rosdakarya. Bandung.
- Wignjosoebroto, S. 1995. *Ergonomi Sudi Gerak dan Waktu. Teknik Analisis Untuk Peningkatan Produktivitas Kerja*. PT. Guna Widya. Jakarta.
- Lararenjana, E. 2020. *Google Maps Adalah Layanan Pemetaan Wilayah Melalui Web, Ketahui manfaatnya*. [www.merdeka.com](http://www.merdeka.com). <https://www.merdeka.com/jatim/google-maps-adalah-layanan-pemetaan-wilayah-melalui-web-ketahui-selengkapnya-klh.html>. Diakses 9 Agustus 2022.
- Panatagama, A. 2020. *Penyedia Layanan Google Maps Indonesia*. [www.terralogic.com](http://www.terralogic.com). <https://terralogiq.com/penyedia-layanan-google-maps/> Diakses 10 Agustus 2022.
- Setiawan, A.S. 2021. *Wah, Pengawasan Pajak Kini Pakai Google Earth*. news.ddtc.co.id. <https://news.ddtc.co.id/wah-pengawasan-pajak-kini-pakai-google-earth-32417> diakses 10 Oktober 2021.

#### **Dokumen Publik dan Peraturan Perundang-undangan**

- Direktur Jenderal Pajak, 2003, Surat Edaran Nomor SE-01/PJ.22/2003 tanggal 8 Agustus 2003 tentang Penyempurnaan Pedoman Pembuatan Monografi Fiskal, Jakarta.
- Direktur Jenderal Pajak, 2020, Surat Edaran Nomor SE-11/PJ/2020 tanggal 28 Februari 2020 tentang Tata Cara Kegiatan Pengumpulan Data Lapangan dan Penjaminan Kualitas Data Dalam Rangka Perluasan Basis Data, Jakarta.